

PERANAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PADA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) KABUPATEN SOLOK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENANGKAP IKAN YANG MENGGUNAKAN ALAT BOM

¹Juliadi Isna Putra, ²Yetisma Saini

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: putrajuliadi38@gmail.com

ABSTRAK

. The criminal act of catching fish using bombs is regulated in Article 84 point 1 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and contains criminal sanctions in it. On July 16, 2019 in Solok Regency, West Sumatra Province, there was the use of bombs in fishing by local fishermen of Danau Singkarak. a bomb device in the waters of Lake Singkarak? (2) What obstacles were found (PSDKP) in overcoming the crime of fishing vessels using bombs in the waters in the waters of the Singkarak lake? This type of research is sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies, data are analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1. The role of the Supervision of Marine and Fisheries Resources (PSDKP) in handling the crime of fishing vessels using bombs in the waters of Lake Singkarak to make pre-emptive and preventive as well as repressive measures. 2. The obstacles encountered were the lack of human resources, facilities and infrastructure

Keywords: PSDKP, Catching, Fish, Bomb

PENDAHULUAN

hayati berkembangbiak di dalam suatu ekosistem tersebut. Selain itu pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya sebagai salah satu faktor keberlangsungan keseimbangan kehidupan yang ada didalamnya. Ekosistem laut merupakan sebuah kesatuan komponen yang berada di laut, yang terdiri dari kekayaan hayati terumbu karang sebagai salah satu pusat berkembang biaknya ikan-ikan karang yang hidup didalamnya.

Pada pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sektoral ekonomi perairan merupakan tempat lumbung perekonomian masyarakat yang perkerjaannya sebagai nelayan dengan melakukan penangkapan ikan, terlepas dari hal itu terdapat juga beberapa aktivitas nelayan dalam kegiatan menangkap ikan yang

merusak ekosistem perairan sehingga menimbulkan kerugian pada banyak pihak.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk melalui Kepres Nomor 165 Tahun 2000 yang diperkuat secara fungsional melalui peraturan Presiden No. 63 Tahun 2016 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan .

Pada tanggal 16 Juli 2019 di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat telah terjadi penggunaan bom dalam penangkapan ikan oleh Nelayan setempat Danau Singkarak yang telah merusak ekosistem di perairan Danau singkarak,

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membagi menjadi 2 rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah peranan (PSDKP) dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kapal penangkap ikan yang menggunakan alat bom di

Wilayah Perairan danau Singkarak (2) Apakah kendala yang ditemukan PSDKP dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kapal penangkap ikan yang menggunakan bom di Wilayah Perairan di Wilayah Perairan danau Singkarak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat [2]. Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan: 1). Doni rahma saputera selaku KEPALA BIDANG UNIT PSDKP 2). Yuniwel hendri selaku PPNS pada BIDANG UNIT PSDKP. pernah melakukan penindakan terhadap kapal yang menggunakan alat bom dalam menangkap ikan di Wilayah Perairan Sumatera Barat. . Lalu data sekundernya di dapat dari buku-buku serta jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai peran dari Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan alat tangkap bom di wilayah perairan Danau Singkarak adalah sebagai berikut

1. Visi PSDKP provinsi Sumatera Barat.
Mewujudkan provinsi Sumatera Barat menjadi Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kerakyatan Tahun 2021.
2. Misi provinsi Sumatera Barat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan produksi, daya saing, kesempatan kerja

Dalam melakukan penegakan hukum pada Kegiatan nelayan yang menangkap ikan

menggunakan bom di wilayah perairan Sumatera Barat oleh PSDKP, Dinas kelautan provinsi sumatera barat, yakni dengan upaya atautindakan Preventif dan Upaya Represif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Doni Rahma Saputra selaku kepala bidang unit Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikan Sumatera Barat.

kendala Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan alat tangkap bom di wilayah perairan Danau Singkarak yang dibagi menjadi dua macam kendala yakni kendala internal dan eksternal , berkaitan dengan kendala internal adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

PSDKP yang bertugas mengawasi perairan dan kelautan dari tindak pidana Penangkapan ikan menggunakan alat bom dengan wilayah Yurisdiksi perairan dan kelautan perikanan Sumatera barat. Pengawasan yang dilakukan dengan jumlah personil PPNS sebanyak 11 personil. Namun pada bidang unit PSDKP itu sendiri hanya berjumlah 2 personil PPNS yang bertugas dalam penindakan setelah di pecah atau ditugaskan pada unit yang berbeda dari jumlah 11 personil PPNS tersebut.

2. Sarana dan Prasarana

Penambahan fasilitas sarana sebagai penunjang efektifitas tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang unit PSDKP, merupakan salah satu faktor penting demi kelancaran penugasan dalam penindakan di sekitaran perairan danau Singkarak, sementara hal tersebutlah yang menjadi suatu kendala dalam mewujudkan optimalisasi

fungsi pengawasan terhadap kegiatan elayan yang menangkap ikan menggunakan bom

[3] Djoko ribawono,2002,Hukum Perikanan Indonesia, PT, Citra AdityaBakti, Bandung

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan PSDKP provinsi Sumatra Barat terhadap menanggulangi tindak pidana Penangkapan ikan menggunakan alat bom memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan alam hayati pada perairan.
2. Sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, sarana dan prasarana merupakan hambatan yang ditemui PSDKP provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana pada kegiatan Penangkapan ikan menggunakan bom sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk menunjang kinerja PSDKP, serta sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas menanggulangi tindak pidana Penangkapan ikan menggunakan alat bom semestinya didukung oleh fasilitas yang memadai seperti penambahan alat transportasi dalam berpatroli dalam wilayah hukum perairan Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barda Nawawi Arief,2011,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011
- [2] Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta